

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

- Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 13
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam Hayati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Negara, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Ketua Asosiasi Koral Karang dan Ikan Hias Indonesia (AKKI)
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 25 September 2018
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas pelayanan sertifikat kesehatan dan karantina untuk perdagangan anemon dan koral
- Ketua Rapat : Viva Yoga Mauladi, M.Si.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 33 Anggota dari 46 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Undangan:
1. Dr. Ir. Rina, M.Si (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan);
 2. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 3. Ir. Agus Dermawan, M.Si (Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 4. Ninuk Rahayuningrum (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan);
 5. R. Fadjar Ronny Tjahjadi (Direktur Teknis Kepabeanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan);
 6. Achsanul Habib (Acting Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri);

7. Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si (Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet);
8. Drs. Tito Setiawan, MM (Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam Hayati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman);
9. Ir. Tommy Hermawan, MA (Perencana Utama Direktorat Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional);
10. Dida Gardera (Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
11. Prof. Dr. Suharsono, MM (Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan
12. Dirga Adhi Putra Singkarru (Ketua Asosiasi Koral Karang dan Ikan Hias Indonesia (AKKHI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam Hayati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Ketua Asosiasi Koral Karang dan Ikan Hias Indonesia dalam rangka membahas pelayanan sertifikat kesehatan dan karantina untuk perdagangan anemon dan koral pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, dibuka pukul 13.30 WIB oleh Ketua Rapat Viva Yoga Mauladi, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemegang dalam memberikan kuota pemanfaatan karang hias secara lestari berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pemegang otoritas ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan apresiasi atas penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan LIPI terkait kebijakan pelarangan lalu lintas koral dan anemon.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan LIPI untuk segera mengkaji ulang tata kelola pemanfaatan karang hias alam dalam rangka menjamin kelestarian spesies koral.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan LIPI untuk melakukan pengawasan dan penertiban bersama atas pemanfaatan karang hias yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pelestarian spesies koral hias.

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar dan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mencabut surat pelarangan izin lalu lintas koral dan anemon dalam rangka meningkatkan nilai ekspor nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

III. Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
A-493

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ttd.

Dr. Ir. Rina, M.Si.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Ir. Wiratno, M.Sc.

Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Ir. Agus Dermawan, M.Si.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,

Ttd.

Ninuk Rahayuningrum

Direktur Teknis Kepabeanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan,

Ttd.

R. Fajar Ronny Tjahjadi

Acting Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri,

Ttd.

Achsanul Habib

Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet,

Ttd.

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Ttd.

Dida Gardera

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam Hayati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,

Ttd.

Drs. Tito Setiawan, MM.

Perencana Utama Direktorat Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Ttd.

Ir. Tommy Hermawan, MA.

Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

Ttd.

Prof. Dr. Suharsono, MM.

Ketua Asosiasi Koral Karang dan Ikan Hias Indonesia,

Ttd.

Dirga Adhi Putra Singkaru

